

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia semakin meningkat, bahkan pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan industri keuangan konvensional. Hal tersebut disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah mencapai 27% atau lebih tinggi dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Indonesia menyimpan banyak potensi untuk semakin mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah jauh lebih pesat.

Bank merupakan suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan/atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk mendapatkan keuntungan dan menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum Islam) yang merupakan sektor industri keuangan syariah yang diperkenalkan pada tahun 1992 yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia bersama Pemerintah Republik Indonesia dengan didirikannya Bank Muamalat. Setelah 26 tahun beroperasi bank syariah tercatat 196 unit yang terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 160 bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Baik bank konvensional maupun bank syariah merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antar pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Selain itu, bank juga sebagai suatu industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga semestinya tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Mengingat pentingnya bank di Indonesia, maka perlu adanya peningkatan kinerja bank agar perbankan tetap sehat dan efisien.

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Profitabilitas dapat dihitung menggunakan beberapa rasio *Gross Profit Margin*, *Cash Flow Margin*, *Return On Assets (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)*. Tingkat *Return On Assets (ROA)* digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar simpanan masyarakat (Edhi dan Syaichu, 2013). Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa selama tahun 2016, profitabilitas industri perbankan mengalami penurunan, hal ini terjadi karena bank-bank mengelembungkan biaya pencadangan akibat meningkatnya rasio kredit bermasalah.

Profitabilitas bank syariah yang diukur dengan *Return On Assets (ROA)* lebih rendah dari tahun ke tahun jika dibandingkan dengan bank

konvensional. Hal tersebut dapat dilihat pada data statistik perbankan Indonesia tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel I.1
Tabel perbandingan ROA bank syariah dan bank konvensional

ROA Bank Umum Konvensional	Tahun	ROA Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2,85%	2014	0,14 %
2,32%	2015	0,49%
2,23%	2016	0,63%
2,45%	2017	0,63%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2017 Desember Vol.16 No.01

Dalam berita harian Kontan.co.id membahas bahwa kemampuan bank syariah dalam mencetak profitabilitas lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Sebab, bank syariah menanggung biaya dana atau *cost of fund* lebih tinggi yang diiringi dengan peningkatan biaya operasional. Dibuktikan dengan *Return On Assets* (ROA) bank syariah yang hanya sebesar 1,23% per Maret 2018 jauh dibandingkan dengan bank konvensional sebesar 2,55% (Yudistira,2018).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja bank, baik faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar. Dimana faktor dari dalam dapat dipengaruhi dan dapat dikendalikan manajemen, sedangkan faktor dari luar tidak dapat dikendalikan manajemen. Faktor-faktor dari dalam diantaranya

efisiensi operasi (BOPO), risiko kredit (NPL), risiko pasar (NIM), permodalan (CAR), dan likuiditas (LDR) (Didik dan Bambang,2013).

Faktor yang pertama adalah efisiensi operasi yang dapat di ukur menggunakan rasio Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO). Melalui rasio ini diukur apakah manajemen bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan efektif dan efisien. Tingginya rasio Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan bahwa bank belum mampu mendayagunakan sumberdayanya dengan maksimal (Yunia dan Andi,2014).

Perbankan syariah tengah mendorong efisiensi kinerja perusahaan, seiring perbaikan kondisi perekonomian. Meskipun demikian, rasio biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO) masih berada di level sekitar 90 persen berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seperti yang dialami oleh Bank BNI Syariah per Mei 2017 yang mencatatkan rasio BOPO relatif sama dibandingkan Desember 2016. BOPO per Desember 2016 sebesar 87,67 persen, sedangkan Mei 2017 sebesar 87,63 persen (Masyrafina,2018).

Selain BOPO faktor lain yang juga merupakan aspek pendapatan adalah NIM yang digunakan untuk mengukur efisiensi yang semakin tinggi nilainya maka akan semakin menggambarkan kinerja yang baik pada bank dan faktor NPL yang merupakan aspek aset. NPL merupakan rasio yang digunakan untuk mnengukur kualitas aset, semakin kecil NPL maka semakin

baik kinerja banknya. Tingginya NPL membuat kinerja memburuk karena menumpuknya kredit macet pada bank (Tan Sau Eng,2013).

Menurut Edhi dan Syaichu, CAR dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif dan berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Tingginya rasio modal dapat melindungi depositan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan suatu bank.

Dijelaskan pada berita harian Kontan.co.id bahwa ada segudang masalah bagi bank syariah untuk menjadi lebih raksasa, diantaranya soal rasio kecukupan modal atau *Capita Adequacy Ratio* (CAR) yang kecil pada bank syariah. Kondisi tersebut membuat kemampuan bank untuk menghasilkan profit dengan jumlah aset yang dimiliki masih terlalu kecil. Dengan rasio *Return On Assets* (ROA) bank syariah yang masih terlalu kecil menunjukkan bank syariah kesulitan menggenjot laba (Dwiantika,2017).

Faktor selanjutnya adalah rasio likuiditas atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Rasio ini menunjukkan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan jumlah dana yang di dapatkan dari masyarakat. Tingkat likuiditas yang dihitung menggunakan rasio ini besarnya ditentukan oleh Bank Indonesia dengan batas maksimal 110% namun masih ada bank yang belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia. PT Bank Bukopin Tbk mencatat bahwa labanya sampai pada Juli 2017 turun 16% secara tahunan. Salah satu penyebabnya adalah risiko likuiditas (LDR) yang rendah. (Yudistira,2017).

Faktor lain yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* (GCG). Manajer berkewajiban memberikan informasi akurat tentang kondisi perusahaan. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cos*). *Corporate governance* sangat berkaitan dengan bagaimana manajer akan memberilam keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan modal yang telah ditanamkan oleh investor (Dian Prasinta,2012).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. GCG merupakan perangkat untuk mengetahui apakah manajemen dalam perusahaan berjalan dengan baik atau tidak. Jajaran pengendali perusahaan penting untuk memiliki *Good Corporate Governance* (GCG). Selain bisa menjadi bekal diri dalam menahkodai perusahaan, pengetahuan itu juga bisa membuat pekerjaan menjadi makin efektif. Tak ayal, bila diterapkan dengan benar, pengetahuan tersebut bisa membuat perusahaan makin besar.

Pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis yang berdampak pada sektor perekonomian sehingga dampaknya banyak dirasakan di sektor perbankan

karena kurangnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Pada tahun 1998 Indonesia memiliki indeks *corporate governance* skornya yang paling rendah yaitu sebesar 2,88 dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura sebesar 8,93, Malaysia sebesar 7,72 dan Thailand sebesar 4,89. Rendahnya kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) dapat menjadi pemicu jatuhnya perbankan. Salah satu sebab yang sangat menonjol yaitu lemahnya perbankan dalam pelaporan kinerja keuangan maupun pengelolaan atau lemahnya dewan komisaris dalam pengawasan dan juga lemahnya para akuntan dan auditor dalam pengawasan sistem dalam perbankan (Suko,2007).

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diungkapkan di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Return On Assets* (ROA), telah banyak pula penelitian terdahulu yang meneliti faktor yang mempengaruhi ROA. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hasbi Ash Sidiq menunjukkan bahwa CAR tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap ROA sedangkan LDR dan GCG berpengaruh secara signifikan terhadap ROA (Hasbi Ash Sidiq,2012). Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Andy Setiawan yang menyatakan bahwa CAR dan GCG tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA dan LDR berpengaruh secara signifikan terhadap ROA (Andy Setiawan,2017). Berbeda dengan hasil penelitian Hasbi dan Andy, Farida, Rina dan Rita dalam penelitiannya menyatakan bahwa CAR memberikan pengaruh terhadap ROA (Farida dkk.,2016). Kemudian dalam penelitian Didik Purwoko dan Bambang Sudiyatno dinyatakan bahwa LDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA (Didik dan

Bambang,2013). Dari penelitian-penelitian terdahulu terjadi perbedaan hasil penelitian (*research gap*).

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kinerja bank yaitu profitabilitas yang diukur menggunakan *return on assets* (ROA) dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu *Good Corporate Governance* yang belum diterapkan dengan baik oleh industri perbankan di Indonesia , Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Net Interest Margin* (NIM) yang masih tinggi pada perbankan , Besarnya *Non Performing Loan* (NPL) karena banyaknya kredit macet , *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal yang menurun dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang rendah menurunkan laba.

Berdasarkan *research gap* dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2016”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Adakah pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Return On Assets* (ROA) Perbankan Syariah ?

- 2) Adakah pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) Perbankan Syariah?
- 3) Adakah pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat dipercaya mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Loan to Deposit Ratio* Terhadap *Return On Assets* (ROA) Perbankan Syariah.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Sebagai sumber informasi yang berguna untuk pengembangan penelitian mengenai perbankan, khususnya bank syariah dan untuk menambah wawasan mengenai rasio-rasio yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah.

2) Manfaat Praktis

Dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam menilai tingkat laba baik dengan rasio yang digunakan atau menganalisis dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk meningkatkan laba.